

PENGUATAN NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Raden Umar¹, Syurya Muhammad Nur², Fendi Hidayat³, Zul Fadhli Sulthani⁴

¹*Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta*

²*Universitas Esa Unggul, Jakarta*

³*Universitas Batam, Batam*

⁴*Universitas Satyagama, Jakarta*

E-mail: raden.rnm@bsi.ac.id¹, syurya.muhammadnur@esaunggul.ac.id²,
fendihidayat@univbatam.ac.id³, zul.fadhli@satyagama.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Esa Unggul dan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tantangan kehidupan berbangsa yang semakin kompleks, seperti meningkatnya intoleransi, apatisme politik, dan radikalisme, yang menuntut pendidikan tinggi untuk berperan lebih aktif dalam membentuk karakter warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap mahasiswa semester lima serta analisis dokumen kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PPKn di kedua universitas telah mencakup nilai-nilai kewarganegaraan seperti nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab sosial, dan pluralisme. Namun demikian, efektivitas internalisasi nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen. Mahasiswa merasakan manfaat dari pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran dan sikap sebagai warga negara, tetapi masih diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif dan kontekstual agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat tertanam secara lebih mendalam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kurikulum yang responsif terhadap dinamika sosial serta peningkatan kapasitas pedagogis dosen dalam mengelola pembelajaran kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Kurikulum, Nilai-nilai Kewarganegaraan, Pendidikan Tinggi, Karakter Mahasiswa*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan yang kompleks. Fenomena seperti meningkatnya intoleransi antar kelompok masyarakat, menguatnya apatisme politik di kalangan generasi muda, serta maraknya paham radikalisme menjadi indikator melemahnya nilai-nilai dasar kewarganegaraan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala intoleransi, misalnya, tampak dari kecenderungan masyarakat yang semakin mudah terpolarisasi karena perbedaan suku, agama, dan pilihan politik. Fenomena ini diperkuat oleh masifnya penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi di media sosial, yang memperlemah semangat persatuan dan kesatuan (Setiawan, 2020).

Sementara itu, tingkat partisipasi politik di kalangan generasi muda menunjukkan kecenderungan stagnan atau bahkan menurun. Banyak mahasiswa yang bersikap apatis terhadap proses politik formal seperti pemilu, dan lebih memilih untuk menjauh dari diskursus kebangsaan yang bersifat substantif. Apatisme politik ini seringkali dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi politik yang dianggap tidak mampu mewakili aspirasi rakyat secara utuh (Hidayat, 2019). Padahal, generasi muda, khususnya mahasiswa, merupakan agen penting dalam proses demokratisasi dan transformasi sosial.

Tidak kalah mengkhawatirkan, radikalisme juga menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Studi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa kelompok usia muda, termasuk mahasiswa, menjadi sasaran utama penyebaran ideologi

radikal. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pendidikan, khususnya pada pendidikan karakter dan kewarganegaraan, yang belum sepenuhnya berhasil membentengi mahasiswa dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (BNPT, 2021).

Menghadapi kondisi tersebut, pendidikan tinggi memegang peran strategis dalam membina dan memperkuat karakter kewarganegaraan mahasiswa. Salah satu instrumen penting adalah penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum, baik melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun melalui pendekatan pembelajaran lintas disiplin. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi lebih jauh, menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, tanggung jawab sosial, dan cinta tanah air.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dapat diintegrasikan secara efektif dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai bagian dari upaya membangun karakter warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam mencetak lulusan yang kompeten secara intelektual dan profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan identitas kewarganegaraan yang kuat. Perguruan tinggi merupakan ruang strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, tanggung jawab sosial, serta semangat pluralisme. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) berada dalam posisi penting untuk mengembangkan pemahaman kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dituntut untuk mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis dan pembangunan nasional (Tilaar, 2004). Oleh karena itu, peran pendidikan tinggi dalam membentuk karakter warga negara tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan dalam setiap aspek pembelajarannya.

Namun, di tengah tantangan sosial dan politik yang terus berkembang, masih banyak ditemukan fenomena yang menunjukkan lemahnya karakter kewarganegaraan mahasiswa. Misalnya, meskipun perguruan tinggi telah menyediakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, belum semua mahasiswa menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Praktik intoleransi, penyebaran hoaks, dan keterlibatan dalam aktivitas politik tanpa pemahaman ideologis yang matang, masih terjadi di lingkungan kampus. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan adanya infiltrasi paham radikal ke dalam komunitas mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan maupun media sosial (Alamsyah, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi perlu dikuatkan secara substansial, tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga afektif dan konatif.

Melihat realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan diperkuat dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, serta sejauh mana kurikulum tersebut mampu membentuk karakter warga negara yang berwawasan kebangsaan, toleran, dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif dalam pendidikan kewarganegaraan agar lebih kontekstual dan aplikatif bagi mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta memberikan masukan praktis bagi para pendidik, penyusun kurikulum, dan pembuat kebijakan di lingkungan pendidikan tinggi.

Tinjauan Pustaka

Nilai-nilai kewarganegaraan merupakan kumpulan prinsip moral, sosial, dan politik yang menjadi dasar bagi seseorang dalam berperan sebagai warga negara yang baik, aktif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, nilai-nilai ini penting untuk ditanamkan secara sistematis karena berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan masyarakat, negara,

serta dalam menghadapi tantangan global. Nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai sistem politik dan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Print, 2007).

Salah satu nilai utama dalam pendidikan kewarganegaraan adalah demokrasi. Demokrasi bukan hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai nilai dan budaya yang mengedepankan dialog, partisipasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Di lingkungan pendidikan tinggi, penanaman nilai demokrasi dapat dilakukan melalui pelibatan mahasiswa dalam organisasi kampus, pemilihan umum mahasiswa, serta diskusi terbuka mengenai isu-isu sosial dan politik (Budimansyah & Suryadi, 2008). Pendidikan yang demokratis mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif, melainkan pelaku aktif yang mampu menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab.

Nasionalisme sebagai nilai kewarganegaraan merujuk pada rasa cinta tanah air, kesetiaan terhadap bangsa, dan komitmen untuk membela serta memajukan negara. Dalam era globalisasi, nasionalisme perlu dipahami secara inklusif, bukan semata-mata sebagai fanatisme sempit, melainkan sebagai sikap bangga dan bertanggung jawab atas keberagaman Indonesia. Pendidikan tinggi memiliki peran dalam menanamkan nasionalisme yang kritis, yakni kesadaran nasional yang dibarengi dengan sikap terbuka terhadap perbedaan dan kemajuan global (Syam, 2015). Melalui kajian sejarah, budaya, serta perbandingan sistem kenegaraan, mahasiswa dapat memahami pentingnya menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan kesadaran akan peran individu dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda dituntut untuk peka terhadap persoalan sosial di sekitarnya, dan berkontribusi dalam bentuk tindakan nyata seperti kegiatan pengabdian masyarakat, kampanye lingkungan, serta advokasi isu-isu publik. Tanggung jawab sosial ini menjadi aspek penting dalam membentuk civic responsibility, yaitu komitmen untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara secara aktif dan etis (Galston, 2001).

Nilai berikutnya adalah pluralisme, yang merujuk pada penerimaan terhadap keragaman budaya, agama, etnis, dan pandangan hidup dalam satu masyarakat. Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan warga negara yang memiliki sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Pluralisme bukan hanya diterima secara formal, tetapi harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ruang akademik dan interaksi antar mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran pluralistik ini melalui kurikulum yang mengangkat isu keberagaman dan keadilan sosial (Nasikun, 2007).

Selain nilai-nilai di atas, konsep kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) juga menjadi bagian penting dalam literatur pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan aktif menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk pengambilan keputusan, pembangunan komunitas, dan pemecahan masalah sosial (Hoskins & Kerr, 2012). Dalam konteks mahasiswa, hal ini mencakup kemampuan berpikir kritis, berorganisasi, serta kemampuan menyuarakan aspirasi secara damai dan konstruktif.

Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi warga negara yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam menjaga serta memperkuat kehidupan demokrasi dan kebangsaan di Indonesia.

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam pembentukan karakter warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga wahana untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan nilai-nilai kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu

publik, serta kesediaan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik (Winataputra, 2013). Pendidikan kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi seharusnya tidak bersifat normatif semata, tetapi juga bersifat transformatif, yaitu mengubah cara pandang dan perilaku mahasiswa agar lebih reflektif, etis, dan berorientasi pada kepentingan bersama (Budimansyah & Tilaar, 2010).

Melalui kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), perguruan tinggi di Indonesia diharapkan mampu memperkuat integritas moral, kesadaran hukum, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap pluralisme. Mata kuliah ini menjadi salah satu instrumen utama dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang utuh. Di sisi lain, peran dosen dan pendekatan pedagogis juga sangat menentukan efektivitas pembelajaran. Pendidikan yang dialogis, kontekstual, dan berbasis pengalaman nyata (*experiential learning*) terbukti lebih mampu membentuk kesadaran kewarganegaraan dibandingkan pendekatan ceramah satu arah (Hidayati, 2018).

Beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn di perguruan tinggi memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap dan orientasi kewarganegaraan mahasiswa. Penelitian oleh Aisyah (2017) menemukan bahwa mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran kewarganegaraan berbasis isu aktual lebih memiliki kepedulian sosial dan kecenderungan partisipasi politik yang lebih tinggi. Sementara itu, studi oleh Nugraha dan Indriyani (2020) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan toleransi dalam pembelajaran PPKn berkontribusi terhadap penguatan identitas kebangsaan mahasiswa. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana menjadikan pembelajaran PPKn lebih menarik, aplikatif, dan tidak terjebak pada aspek kognitif semata.

Selain itu, Hoskins dan Crick (2008) dalam konteks pendidikan Eropa juga menekankan pentingnya civic education yang mampu mendorong *active citizenship* melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial, organisasi kampus, dan pengambilan keputusan. Model seperti ini bisa diadaptasi dalam konteks Indonesia untuk mendorong pendidikan kewarganegaraan yang lebih partisipatif. Oleh karena itu, inovasi dalam desain kurikulum, metode pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas peran pendidikan tinggi dalam pembangunan karakter kewarganegaraan.

Dengan melihat pentingnya peran pendidikan tinggi dalam membentuk warga negara yang sadar, aktif, dan berintegritas, maka penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum tidak dapat ditawar. Pendidikan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam merespons tantangan kebangsaan dengan menanamkan nilai-nilai dasar yang menopang keberlangsungan demokrasi dan keutuhan bangsa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mengenai penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengungkap makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian terhadap fenomena yang dikaji (Creswell, 2016).

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) dan Universitas Esa Unggul, yang keduanya merupakan institusi pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa kedua kampus memiliki karakteristik yang representatif dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan serta memiliki keragaman latar belakang mahasiswa.

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif semester 5 dari kedua universitas tersebut. Informan dipilih berdasarkan asumsi bahwa pada semester ini, mahasiswa telah mengikuti dan mengalami proses pembelajaran PPKn secara utuh dan dapat memberikan refleksi kritis terhadap muatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum maupun proses pembelajaran. Teknik

pemilihan informan menggunakan purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam mengikuti perkuliahan PPKn.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua metode utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan kepada mahasiswa untuk memperoleh data tentang pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap nilai-nilai kewarganegaraan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Analisis dokumen kurikulum, khususnya silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah PPKn di kedua universitas, guna menelaah sejauh mana nilai-nilai kewarganegaraan seperti demokrasi, nasionalisme, tanggung jawab sosial, dan pluralisme dimuat secara eksplisit maupun implisit dalam materi dan tujuan pembelajaran.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen kurikulum dan hasil wawancara. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam materi ajar dan pengalaman mahasiswa. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari hasil wawancara dengan data dokumen dan pengamatan kontekstual.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan dibangun dan diinternalisasikan dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, serta bagaimana pengalaman mahasiswa dalam merespons dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sebagai warga negara.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kurikulum PPKn di Perguruan Tinggi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai mata kuliah wajib umum yang dirancang untuk membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, beretika, dan cinta tanah air. Kurikulum PPKn di berbagai perguruan tinggi pada dasarnya dirancang untuk memperkuat pemahaman terhadap ideologi negara, konstitusi, demokrasi, serta nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan amanat Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa setiap mahasiswa wajib memperoleh pendidikan karakter melalui mata kuliah umum (MKU) termasuk PPKn.

Struktur Kurikulum PPKn

Berdasarkan dokumen kurikulum yang dianalisis dari Universitas Esa Unggul dan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), mata kuliah PPKn umumnya diberikan pada semester awal perkuliahan (semester 1 atau 2), dengan bobot 2 sks. Materi pembelajaran yang tercantum mencakup tema-tema inti seperti:

1. Pancasila dan Konstitusi
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara
3. Demokrasi Indonesia
4. Identitas dan Integrasi Nasional
5. Hak Asasi Manusia
6. Anti Korupsi, Kesadaran Pajak, dan Bela Negara
7. Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara

Di Universitas Esa Unggul, berdasarkan dokumen kurikulum (UEU-Course-15130), terdapat pendekatan yang menyelaraskan antara penguasaan konsep kewarganegaraan dengan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mahasiswa. Penekanan pada metode pembelajaran interaktif dan berbasis konteks sosial aktual menjadi ciri khas pendekatan kurikulum di kampus ini.

Sedangkan di Universitas BSI, kurikulum PPKn tampak lebih terstruktur dengan rincian topik yang mencerminkan pemahaman menyeluruh terhadap sistem ketatanegaraan dan budaya politik Indonesia. Mahasiswa secara eksplisit dilatih untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dalam kehidupan masyarakat majemuk serta bagaimana menjadi agen perubahan sosial melalui pemahaman politik dan hukum.

Pengalaman Mahasiswa dalam Mengikuti Mata Kuliah PPKn

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa di Universitas Esa Unggul, terungkap bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh dosen, seperti diskusi dan tanya jawab interaktif, berhasil menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik. Mahasiswa menyatakan bahwa metode tersebut mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran dan mempermudah pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Pendekatan seperti ini mencerminkan model pedagogi konstruktivis, di mana pengetahuan dibentuk melalui keterlibatan langsung mahasiswa dalam proses belajar (Vygotsky, 1978).

Sementara itu, mahasiswa Universitas BSI menekankan bahwa mereka memperoleh pemahaman mendalam mengenai tema-tema utama dalam pendidikan kewarganegaraan seperti identitas nasional, konstitusi, demokrasi, integrasi nasional, hingga isu-isu strategis seperti anti-korupsi dan bela negara. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan konteks kekinian, termasuk kesadaran pajak dan ketahanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum PPKn di BSI memiliki cakupan yang luas dan berupaya membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, serta perannya dalam pembangunan berkelanjutan.

Nilai-nilai Kewarganegaraan yang Ditekankan

Di Universitas Esa Unggul, mahasiswa merasakan adanya penekanan kuat pada nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Hal ini tercermin dalam ajakan dosen untuk memahami sejarah bangsa, menghargai budaya lokal, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai ini sangat penting dalam konteks kebhinekaan Indonesia, di mana nasionalisme menjadi pengikat utama dalam masyarakat yang sangat majemuk (Nasution, 2017).

Sebaliknya, mahasiswa di Universitas BSI mencatat bahwa kurikulum menekankan pada pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mengenal sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kurikulum lebih berbasis pada civic literacy yang kuat, sesuai dengan konsep citizenship education yang mengedepankan pengetahuan hukum dan politik sebagai fondasi partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara (Kerr, 2003).

Relevansi Materi PPKn dengan Kehidupan Nyata

Mahasiswa dari kedua universitas menyatakan bahwa materi yang disampaikan dalam mata kuliah PPKn sangat relevan dengan kehidupan nyata. Mahasiswa Universitas Esa Unggul menyampaikan bahwa pemahaman tentang hak, kewajiban, dan keterlibatan dalam kehidupan sosial-politik menjadi lebih tajam. Mereka merasa lebih siap dan percaya diri untuk menjadi warga negara yang berdaya secara sosial dan politis.

Di sisi lain, mahasiswa BSI memberikan contoh konkret tentang bagaimana mereka mengaitkan materi PPKn dengan aktivitas sehari-hari, seperti berpartisipasi dalam pemilu, menyampaikan pendapat secara demokratis, serta memahami pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti pada aspek kognitif semata, tetapi juga telah menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, yang penting dalam membentuk karakter warga negara yang utuh (Banks, 2008).

Pengaruh Terhadap Sikap dan Perilaku Kewarganegaraan

Dampak dari pembelajaran PPKn terhadap sikap dan perilaku mahasiswa tampak nyata dari hasil wawancara. Mahasiswa Esa Unggul menyatakan bahwa mereka menjadi lebih kritis terhadap isu-isu sosial dan politik, serta merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan PPKn telah mendorong pembentukan kesadaran kewarganegaraan (civic consciousness) dan semangat kontribusi sosial.

Mahasiswa dari Universitas BSI pun menunjukkan hasil serupa. Mereka mampu mengaitkan berbagai materi seperti demokrasi Pancasila, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional dengan tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat dan negara. Hal ini mendukung pandangan bahwa civic education di tingkat perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam mencetak warga negara yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga beretika dan berintegritas (Print, 2007).

Kontekstualisasi Temuan

Temuan ini sangat relevan dengan tantangan kehidupan berbangsa saat ini, di mana maraknya intoleransi, apatisisme politik, dan radikalisme menjadi ancaman nyata bagi keutuhan NKRI. Melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang tepat, nilai-nilai dasar seperti pluralisme, demokrasi, dan nasionalisme dapat ditanamkan secara efektif pada generasi muda, khususnya mahasiswa.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sapriya (2017), pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual mampu menjadi instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya serta siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, keberadaan mata kuliah PPKn di pendidikan tinggi tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai instrumen penting dalam pembangunan karakter bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi, seperti yang terdapat di Universitas Esa Unggul dan Universitas BSI, telah memuat berbagai dimensi nilai kewarganegaraan seperti nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab sosial, dan pluralisme. Hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa mereka merasakan dampak positif dari mata kuliah ini, terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membangun sikap kritis terhadap isu-isu sosial-politik di masyarakat. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara substansi kurikulum yang tertuang dalam dokumen formal dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang belum sepenuhnya kontekstual dan partisipatif, sehingga nilai-nilai kewarganegaraan belum secara optimal terinternalisasi dalam kehidupan nyata mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan tinggi memiliki posisi strategis dalam merespons berbagai tantangan kebangsaan seperti intoleransi, apatisisme politik, dan radikalisme melalui penguatan pembelajaran kewarganegaraan yang berorientasi pada nilai dan karakter.

Saran

Sebagai upaya penguatan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi, disarankan agar kurikulum PPKn tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga lebih menekankan pada pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas sosial yang dihadapi mahasiswa. Dosen perlu mendorong pembelajaran yang partisipatif, reflektif, dan berbasis nilai sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran kritis dan tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, perlu adanya evaluasi kurikulum secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan tantangan global, seperti disinformasi digital, krisis toleransi, dan penguatan etika publik. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus menjadi ruang pembentukan karakter kebangsaan yang berkelanjutan, tidak hanya sebagai mata kuliah formal, tetapi sebagai proses pendidikan yang membentuk integritas dan identitas warga negara Indonesia yang utuh.

Referensi

- Alamsyah, A. (2020). *Radikalisme di Lingkungan Mahasiswa: Analisis Strategi Pencegahan di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 75–88.
- Aisyah, S. (2017). *Pengaruh Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Isu terhadap Sikap Kewarganegaraan Mahasiswa*. Jurnal Civicus, 6(2), 145–158.
- Banks, J. A. (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Laporan Tahunan BNPT 2021*. Jakarta: BNPT.
- Budimansyah, D., & Suryadi, A. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., & Tilaar, H. A. R. (2010). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galston, W. A. (2001). *Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education*. Annual Review of Political Science, 4, 217–234.
- Hidayat, S. (2019). *Apatisme Politik Generasi Muda: Studi pada Mahasiswa di Yogyakarta*. Jurnal Politik dan Kebijakan, 5(2), 133-145.
- Hidayati, T. (2018). *Model Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Pengalaman untuk Meningkatkan Civic Disposition Mahasiswa*. Jurnal PKn Progresif, 13(1), 1–12.
- Hoskins, B., & Kerr, D. (2012). *Final Study Summary and Policy Recommendations: Participatory Citizenship in the European Union*. European Commission.
- Hoskins, B., & Crick, R. D. (2008). *Learning to Learn and Civic Competences: Different currencies or two sides of the same coin?*. European Journal of Education, 43(4), 461–472.
- Kerr, D. (2003). *Citizenship Education in England: The Making of a New Subject*. Journal of Social Science Education, 2(1).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nasikun. (2007). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, S. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Global*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, D., & Indriyani, N. (2020). *Penguatan Nilai-Nilai Kewarganegaraan dalam Kurikulum PPKn di Perguruan Tinggi*. Jurnal Demokrasi dan Pendidikan, 18(1), 27–39.
- Print, M. (2007). *Citizenship Education and Youth Participation in Democracy*. British Journal of Educational Studies, 55(3), 325–345.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, E. (2020). *Intoleransi dan Polarisasi Sosial di Era Digital*. Jurnal Sosial dan Budaya, 12(1), 45–58.
- Syam, A. (2015). *Nasionalisme di Era Globalisasi: Reaktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(2), 215–228.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Winataputra, U. S. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum*. Jakarta: Universitas Terbuka.